

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ukuran kinerja ekonomi suatu wilayah. Agar pembangunan ekonomi dapat berlanjut dan kesejahteraan meningkat, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sebagai syarat utama. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi elemen yang penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indrayanti, 2020). Menurut Todaro (2006), Pembangunan memiliki berbagai tujuan. Pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup setiap individu, yang mencakup pendapatan, konsumsi makanan, pakaian, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Kedua, bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan rasa percaya diri individu melalui pembentukan sistem sosial, politik, dan ekonomi serta lembaga-lembaga yang menghargai martabat dan rasa hormat terhadap manusia. Ketiga, fokus pada meningkatkan kebebasan individu dalam memilih dari berbagai opsi yang ada. (Bustamam et al., 2021) Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pembangunan diharapkan dapat melakukan hal-hal berikut. Pertama, memastikan adanya kesetaraan dan keadilan dalam proses pembangunan, baik dari segi regional maupun sosial. Kedua, meningkatkan kapasitas masyarakat dan menangani masalah kemiskinan. Ketiga, menciptakan peluang kerja baru dan memperluas kesempatan kerja. Keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kelima, melestarikan sumber daya alam agar tetap dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan masa depan.

Kesejahteraan adalah sesuatu yang diidam-idamkan setiap individu. Di tingkat negara, kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama yang ingin dicapai. Salah satu tanda keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesejahtraannya. Kesejahteraan meliputi aspek keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga mencerminkan kualitas hidup keluarga. Keluarga yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi biasanya merasakan kualitas hidup yang lebih baik, yang pada gilirannya

memungkinkan mereka untuk menciptakan keadaan yang lebih menguntungkan guna meningkatkan kesejahteraan mereka. Masyarakat dianggap sejahtera jika mereka mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Salah satu tantangan yang dihadapi banyak negara terkait kesejahteraan masyarakat adalah ketidakmampuan sebagian orang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri.

Menurut (Kakisina, 2011) Mengungkapkan bahwa usaha untuk memperbaiki kesejahteraan dapat dilakukan melalui peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Pada dasarnya, kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan kekurangan yang tidak dapat dihindari oleh individu yang mengalami situasi tersebut. Menurut Kuncoro (2000) Pertumbuhan ekonomi yang rendah, tingkat pendidikan yang sangat rendah, keterbatasan sumber daya alam, jumlah lapangan kerja yang terbatas, kurangnya modal, dan beban keluarga semua faktor ini berkontribusi pada siklus kemiskinan yang sulit diatasi.

Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia meningkat pada tahun 2018 menjadi 9,82%. Pada tahun 2019, angka tersebut menurun menjadi 9,41%, tetapi kembali meningkat menjadi 9,78% pada

tahun 2020. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin meningkat lagi menjadi 10,14%, dan pada tahun 2022 turun menjadi 9,54%. Tren penurunan dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa program-program pembangunan ekonomi yang diterapkan telah memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi persentase penduduk miskin di Indonesia. Meskipun persentasenya menurun, jumlah penduduk miskin tetap tinggi, disebabkan oleh besarnya populasi di negara ini.

Indonesia, sebagai negara yang luas dengan 34 provinsi, menghadapi berbagai masalah kemiskinan di masing-masing provinsi. Selama lima tahun terakhir, Indonesia berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara keseluruhan, termasuk di berbagai daerah. Namun, masih terdapat banyak daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional, seperti Provinsi Papua. Provinsi Papua merupakan salah satu wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Dikarenakan rendahnya Tingkat Pendidikan, dan sulitnya akses transportasi ke wilayah terpencil di Papua. Hal ini dapat dilihat dari gambar dibawah ini

Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistika

Pada Grafik di atas dapat dilihat bahwa Penduduk miskin di Papua mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan presentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk yang tinggi, kurangnya lapangan pekerjaan dan pengaruh kebijakan pemerintah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.

Penduduk miskin dianggap sebagai mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan yang jauh di bawah garis kemiskinan. Pengeluaran per kapita di Provinsi Papua mengalami ketimpangan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan seperti Jayapura, pengeluaran per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan yang terpencil. Geografis Papua yang sulit dijangkau dan terbatasnya infrastruktur menyebabkan harga barang dan jasa di Papua lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini meningkatkan biaya hidup dan mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat. Keterbatasan transportasi dan logistik juga menyebabkan distribusi barang menjadi lebih mahal, yang secara langsung berdampak pada pengeluaran per kapita.

Perbedaan pengeluaran per kapita antara masyarakat perkotaan dan pedesaan di Papua disebabkan oleh tingkat pendidikan. Salah satu indikator pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah. Di beberapa wilayah di Indonesia, masih ada ketimpangan dalam sektor pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal yang belum memiliki akses terhadap infrastruktur dasar. (Saputra et al., 2015). Menurut Todaro dan Smith, ketimpangan tidak hanya disebabkan oleh distribusi pendapatan, tetapi juga oleh faktor pendidikan. Oleh sebab itu, pendidikan dianggap sebagai salah satu tujuan utama dalam pembangunan. (Tambuna, 2013). Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk anak usia 13-15 tahun di jenjang SMP di Provinsi Papua lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Banyaknya anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD). Faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk keterbatasan ekonomi keluarga, jarak yang jauh ke sekolah, dan kebutuhan untuk bekerja membantu keluarga.

Rendahnya tingkat pendidikan di Provinsi Papua menyebabkan minat masyarakat untuk bekerja formal menurun. Mereka lebih bergantung pada pertanian subsisten sebagai sumber utama penghidupan mereka. Mereka biasanya menanam tanaman seperti sagu, ubi kayu, pisang, dan kelapa sebagai makanan pokok. Di sisi lain, penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Papua dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan keterampilan, keterbatasan peluang kerja, dan infrastruktur yang kurang memadai. Selain itu, penurunan TPAK memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut, karena banyaknya kemiskinan dan pengangguran yang akan terjadi.

1.2 Batasan Masalah

Penulis menetapkan batasan masalah untuk menjaga focus penelitian agar tetap relevan dengan pokok bahasan yang ingin diteliti. Penelitian ini menggunakan data selama lima tahun dari tahun 2018 sampai 2022 dan sebanyak 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Penelitian ini akan terbatas pada Variabel Pengeluaran perkapita, Angka Partisipasi Sekolah umur 13-15 tahun, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebagai variabel independen (X) dan Persentase Penduduk Miskin sebagai variabel dependen (Y). Fokus pembatasan wilayah penelitian ini pada 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

1.3 Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, rumusan masalah disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Variabel Pengeluaran Perkapita, Angka Partisipasi Sekolah, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2018-2022?
2. Bagaimana Pengaruh Variabel Variabel Pengeluaran Perkapita, Angka Partisipasi Sekolah, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara Simultan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Variabel Pengeluaran Perkapita, Angka Partisipasi Sekolah, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara parsial

terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2013-2022.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Variabel Pengeluaran Perkapita,Angka Partisipasi Sekolah,dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara Simultan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 2013-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Papua , eksplorasi ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pemikiran untuk pengaturan perbaikan provinsi. Dengan demikian, keputusan yang lebih bijak dapat diambil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Sebagai bahan referensi dan data untuk eksplorasi tambahan oleh semua perkumpulan ujian terkemuka, eksplorasi ini dapat membantu memperluas pengetahuan dan meningkatkan kemampuan analisis dalam bidang yang terkait.

